

## 1. Pendahuluan

Laporan keuangan pemerintah di Indonesia menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama satu periode. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD merupakan unit – unit organisasi yang berada dibawah Pemerintah Daerah, seperti dinas, badan, kantor, atau lembaga lainnya. SKPD memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini SKPD memiliki kaitan yang erat dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD adalah dokumen yang berisi informasi terperinci mengenai kondisi keuangan suatu pemerintah daerah, seperti kabupaten atau kota. Laporan ini mencakup neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang penerimaan, pengeluaran, asset, kewajiban, serta kinerja keuangan pemerintah daerah selama periode tertentu. Dalam kaitannya SKPD memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan dan menggunakan anggaran yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Daerah. Maka, SKPD wajib menyusun laporan keuangan yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana yang dikelola.

Laporan keuangan dari setiap SKPD ini kemudian akan diintegrasikan dan diagregasi menjadi laporan keuangan secara keseluruhan. Laporan ini memberikan gambaran tentang penggunaan dana publik oleh masing – masing SKPD dan membantu dalam memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelola keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan. Dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, laporan keuangan harus memenuhi kriteria yang memadai yaitu relevan, dapat diandalkan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Setiap tahunnya laporan keuangan pada pemerintah daerah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan memperoleh opini dari BPK. Terdapat tiga jenis pemeriksaan menurut BPK yang harus dilaksanakan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dan juga terdapat empat opini yang diberikan oleh BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), dan Tidak Wajar (TW).

Selama lima tahun terakhir (2017 – 2021) opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terus mengalami perbaikan. Selama periode tersebut, laporan yang memperoleh opini WTP naik sebesar 16,4%, yaitu 76% pada tahun 2017 menjadi 92,4% pada tahun 2021. Sementara itu, jumlah laporan yang memperoleh opini WDP mengalami penurunan sebesar 14%, yaitu dari 21% pada tahun 2017 menjadi 7% pada tahun 2021. Kabupaten Semarang merupakan salah satu Kabupaten yang menerima opini WTP selama lima tahun berturut – turut, capaian opini tersebut sebagai berikut :

Tabel 1  
Capaian opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Semarang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK RI, 2022

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan kondisi bahwa Provinsi Jawa Tengah khususnya Kabupaten Semarang telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). LKPD 2021 yang dilaporkan telah disesuaikan dengan sistem pengendalian internal dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Opini audit WTP merupakan opini audit yang diterbitkan ketika laporan keuangan diyakini mengandung informasi yang bebas dari salah saji. Bukti – bukti yang telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan apabila terdapat kesalahan maka kesalahan tersebut dianggap tidak signifikan dan tidak material terhadap pengambilan keputusan. Pencapaian WTP ini harus terus dipertahankan dan BPK

meminta kepada Pemerintah Daerah peraih opini WTP untuk segera menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan guna perbaikan laporan berikutnya (<https://main.semarangkab.go.id>).

Pencapaian opini WTP Kabupaten Semarang merupakan hasil dari kerja sama antara legislatif dan eksekutif, hingga sampai ke tingkat kepala desa. Dibalik pencapaian opini WTP, Kabupaten Semarang terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan dan dibenahi yaitu memanfaatkan dana APBD, dana desa, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai peraturan yang berlaku (<https://jatengprov.go.id>). Berdasarkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 pasal 5 ayat 1 menjelaskan bahwa penyusunan APBD tahun anggaran 2022 dialokasikan untuk mendukung penanganan pandemic covid – 19 dan dampaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Kabupaten Semarang mengeluarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 109 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021. Dana desa digunakan untuk kegiatan yang diutamakan seperti padat karya tunai desa, sebuah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk memberikan upah tambahan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemudian program stunting, program untuk mengurangi kondisi gagal tumbuh anak akibat kekurangan gizi. BLT desa, sebuah bantuan yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya covid – 19. Dan program Sustainable Development Goals Desa, upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Peraturan Bupati Semarang No. 32 tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman untuk pemberian Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman kepada kelompok Masyarakat/Pemerintah Desa, menjelaskan DAK digunakan untuk mendukung terwujudnya lingkungan hunian yang layak dan sehat maka perlu adanya ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai. Jenis yang diserahkan berupa Prasarana yang terdiri dari : jaringan jalan, saluran pembuangan air limbah dan air hujan, dan tempat pembuangan sampah. Sarana : rekreasi, olahraga, pertamanan dan ruang terbuka hijau. Utilitas umum : jaringan air bersih, listrik, pemadam kebakaran dan penerangan jalan umum.

Berdasarkan fenomena, pemerintah Kabupaten Semarang dalam mempertahankan opini WTP maka harus terus meningkatkan kualitas laporan. Faktor – faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan antara lain Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia. Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan pada pemerintah adalah suatu sistem yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Hasanah et al., 2021). Budaya Organisasi merupakan suatu kekuatan sosial yang tidak tampak yang dapat menggerakkan orang – orang dalam suatu organisasi untuk melakukan aktivitas kerja (Prof. Dr. H. Edy Sutrisno, 2019). Sumber Daya Manusia menjadi salah satu elemen penting, Kompetensi Sumber Daya Manusia mencakup kapasitasnya yaitu, kemampuan seseorang, suatu organisasi, atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi – fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Triwardana, 2017).

Penelitian terdahulu oleh (Hasanah et al., 2021) dan (Yusriwati, 2022) menyatakan hasil Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian (Trisnawati, 2021) dan (Munggaran et al., 2020) menyatakan hasil Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian sebelumnya tentang Budaya Organisasi oleh (Andari et al., 2022) menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. Sedangkan (Patty, 2019) menyatakan Budaya Organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan karena, belum

terciptanya budaya organisasi yang baik dilingkungan pemerintah kota Ambon. Penelitian tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia (Apriansyah, 2020) dan (Mahardini, 2018) menyatakan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Pemerintah daerah membutuhkan SDM yang professional untuk menjalankan fungsinya serta melaksanakan tugas dengan tuntas.

Dari penjelasan mengenai fenomena dan beberapa hasil penelitian maka dapat diperoleh gambaran mengenai Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pembaruan data yang diambil pada tahun penelitian yaitu di tahun 2023 dan objek penelitian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan data primer, yang diperoleh dari instrument penelitian berupa kuesioner. Pentingnya penelitian ini untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka pertanyaan dalam penelitian ini yaitu : Apakah Sistem Pengendalian Internal dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?, Apakah Budaya Organisasi dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?, Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji secara empiris pengaruh sistem pengendalian internal, budaya organisasi, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.

## **2. Kajian Pustaka**

### **2.1. Kajian Teori**

#### **2.2.1 Teori Stewardship (*Stewardship Theory*)**

Teori *Stewardship* adalah teori yang mendasari penelitian ini, teori yang dipopulerkan oleh (Donaldson & Davis, 1991) menjelaskan bagaimana manajer bertindak sebagai pengurus atau pengawas dalam menjaga sumber daya perusahaan. Menurut Donaldson & Davis teori *stewardship* merupakan teori yang menggambarkan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan individu melainkan lebih fokus terhadap tujuan utama yaitu kepentingan organisasi. Teori Stewardship lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibanding kepentingan pribadi, sehingga teori ini menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Jika terjadi perbedaan pendapat maka dilakukan diskusi, dan akan diambil sebuah keputusan yang mengutamakan kepentingan bersama. Hal ini seperti Organisasi Perangkat Daerah yang mengutamakan kepentingan rakyat dengan memberikan pelayanan publik.

Implikasi dari teori stewardship pada penelitian ini adalah pemerintah sebagai steward dapat menunjukkan keberadaannya sebagai suatu instansi yang dapat dipercaya, dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi publik, bertanggungjawab atas laporan keuangan yang diamanahkan, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi dan kesejahteraan masyarakat tercapai. Dalam menyusun laporan keuangan pemerintah cenderung memperhatikan risiko pelaporan keuangan, dimana pemerintah menunjukkan hasil utama pada kepentingan organisasi dibandingkan dengan kepentingan tujuan individu. Pemerintah sebagai pengelola anggaran diharapkan dapat bekerja dengan baik untuk kepentingan principal yaitu masyarakat dan instansi sebagai perangkat daerah yang dapat dipercaya untuk melaksanakan kepentingan publik dengan tugas dan fungsi yang tepat, serta merencanakan dan melaksanakan anggaran sesuai amanah. Maka tujuan pengelolaan dapat tercapai dengan maksimal.

### **2.2.2 Kualitas Laporan Keuangan**

Laporan keuangan menjadi bagian akhir dari proses akuntansi selama satu periode dalam bentuk laporan pertanggungjawaban dengan mencatat seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 1 ayat 1 Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelola keuangan negara/daerah selama suatu periode. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi – transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data dan juga dapat dikatakan sebagai informasi, data dikatakan menjadi informasi jika diubah menjadi konteks yang memberikan makna (Ariyanto, 2020). Maka, laporan keuangan merupakan catatan terstruktur yang memberikan informasi tentang kondisi keuangan suatu entitas dan transaksi pelaporan selama suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut (Apriansyah, 2020).

### **2.2.3 Sistem Pengendalian Internal**

Sistem pengendalian internal merupakan suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode yang dikoordinasikan dengan tujuan untuk memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, serta mendorong dipatuhinya kebijakan yang telah ditetapkan (Hasanah et al., 2021). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal, menjelaskan Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan.

Sistem pengendalian internal memiliki peran dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan. Dengan diterapkannya Sistem Pengendalian Internal untuk mencegah terjadinya aktivitas yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan cara ini maka dapat diperoleh efisiensi, manfaat, dan ekonomi dalam implementasi serta pembangunan (Munggaran et al., 2020).

### **2.2.4 Budaya Organisasi**

Pengertian budaya organisasi berdasarkan PERMENPANRB No. 39 Tahun 2012 adalah sistem nilai bersama dalam suatu organisasi yang menjadi acuan bagaimana para pegawai melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan atau cita – cita organisasi. Menurut (Pakpahan & Legi, 2022) budaya organisasi adalah suatu sistem pemaknaan bersama, dalam suatu organisasi yang berkaitan dengan nilai, norma, keyakinan, tradisi dan cara berpikir, yang tampak pada perilaku manusia sehingga membedakan antara satu organisasi dengan organisasi lainnya.

Budaya organisasi menciptakan pemahaman bersama di antara para anggota organisasi tentang apa sebenarnya organisasi itu dan bagaimana seharusnya para anggota berperilaku (Sadad et al., 2016). Budaya organisasi menjadi suatu pemahaman yang berkaitan dengan perilaku seseorang pada suatu organisasi dalam melakukan kegiatan. Sehingga keberhasilan suatu organisasi dapat dilihat dari budaya organisasi yang berlaku.

### **2.2.5 Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Kompetensi adalah suatu karakteristik seseorang yang meliputi keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan. Jika seseorang memiliki kompetensi maka akan bekerja dengan pengetahuan serta keterampilannya, sehingga dapat bekerja dengan mudah, cepat, responsive, dan dengan pengalaman yang dimiliki dapat meminimalisir kesalahan (Mahardini, 2018). Dalam PERMENPANRB No. 37 Tahun 2020 standar kompetensi adalah kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu di bidang pengelolaan, perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi dalam sistem SDM Aparatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir meliputi aspek pengetahuan, keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.

Dalam menjalankan fungsinya, pemerintah membutuhkan sumber daya manusia yang profesional dan berkompoten. Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan kemampuan seseorang dalam suatu organisasi dalam melaksanakan fungsinya untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien (Triwardana, 2017). Sumber Daya Manusia dalam suatu organisasi menjadi elemen yang sangat penting, maka perlu adanya pengelolaan yang baik. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang kompeten dapat menjadi penentu suatu instansi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

### **2.2. Penelitian Terdahulu**

Penelitian (Sumaryati et al., 2020) yang berjudul *Accounting Information System, Internal Control System, Human Resource Competency and Quality of Local Government Financial Statement in Indonesia* menyatakan hasil Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan, sedangkan Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian (Trisnawati & Nugraha, 2021) yang berjudul *The Influence of Human Resources Competence and Government Internal Control System on Quality Government Financial Statement* menyatakan hasil Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Penelitian (Mahardini, 2018) yang berjudul *Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015* menyatakan hasil Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015.

Penelitian (Maydiyanti et al., 2020) yang berjudul *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru* menyatakan hasil Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Penerapan SAKD, dan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan variabel yang tidak mempengaruhi dalam penelitian ini yaitu Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia.

Penelitian (Hasanah et al., 2021) yang berjudul *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD di Kabupaten Labuhanbatu* menyatakan hasil Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan, sedangkan Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Penelitian (Andari et al., 2022) yang berjudul *Pengaruh Etika Kepemimpinan, Kualitas Sistem Informasi Akuntansi, Fungsi Badan Pengawas, Tingkat Pemahaman Akuntansi, Dan Budaya Organisasi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Blahbatu* menyatakan hasil Etika Kepemimpinan dan Fungsi Badan Pengawas

tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan, sedangkan Sistem Informasi Akuntansi, Tingkat Pemahaman Akuntansi, dan Budaya Organisasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Penelitian (Patty, 2019) yang berjudul Pengaruh Penerapan *Good Governance* Dan Budaya Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kepemimpinan Transformasional Sebagai Pemediasi. Penelitian ini dilakukan di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Menyatakan hasil *Good Governance* dan Budaya Organisasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan, sedangkan melalui Kepemimpinan Transformasional sebagai Pemediasi *Good Governance* dan Budaya Organisasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

### **2.3. Hipotesis Penelitian**

#### **2.3.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Sistem Pengendalian Internal diharapkan menjadi pedoman agar penyusunan laporan keuangan dapat memenuhi asas ketertiban yang mencerminkan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan, apabila Sistem Pengendalian Internal mengalami peningkatan maka, kualitas laporan keuangan juga meningkat dan memberikan hasil yang baik (Puspita et al., 2021). Dari teori stewardship menunjukkan dimana pemerintah sebagai steward menjadi pengendali untuk mengolah sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. Sistem Pengendalian Internal juga menjadi alat tolak ukur pencapaian kinerja.

Semakin tinggi pemahaman Sistem Pengendalian Internal maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan akan semakin meningkat. Berdasarkan penelitian (Trisnawati et al., 2021) dan (Munggaran et al., 2020) Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian (Rahayu et al., 2020) juga membuktikan bahwa, Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini memberikan bukti bahwa Sistem Pengendalian Internal telah dipahami serta telah dilakukan secara efektif dan efisien. Dari penelitian tersebut maka hipotesis yang disusun yaitu :

H<sub>1</sub> : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan

#### **2.3.2 Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Budaya organisasi yang baik dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan pegawai, meningkatkan kerjasama, serta mengurangi konflik terhadap suatu perubahan. Budaya organisasi yang baik juga meningkatkan loyalitas pegawai, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih inovatif. Perubahan struktur birokrasi, sistem, cara kerja, dan peraturan menjadi pedoman pelaporan keuangan pemerintah, tentunya akan menyebabkan perubahan budaya organisasi pemerintah yang telah ada selama ini (Patty, 2019). Budaya organisasi yang mementingkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dapat mendorong penyajian laporan keuangan yang akurat dan jujur.

Dari teori stewardship menunjukkan dimana pemerintah sebagai steward akan bekerja penuh tanggung jawab dalam mewujudkan sasaran dan target yang telah ditentukan dengan budaya organisasi yang berlaku pada setiap organisasi pemerintahan. Budaya organisasi yang mendukung prinsip – prinsip stewardship dapat memperkuat sistem pengendalian internal dan memotivasi sumber daya manusia untuk bertindak sebagai pengurus yang penuh tanggungjawab. Semakin tinggi etika dan perilaku yang baik diterapkan maka akan mengurangi tingkat manipulasi serta pelanggaran yang merugikan. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh (Andari et al., 2022) Budaya Organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dari penelitian tersebut maka hipotesis yang disusun yaitu :

H<sub>2</sub> : Budaya Organisasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan

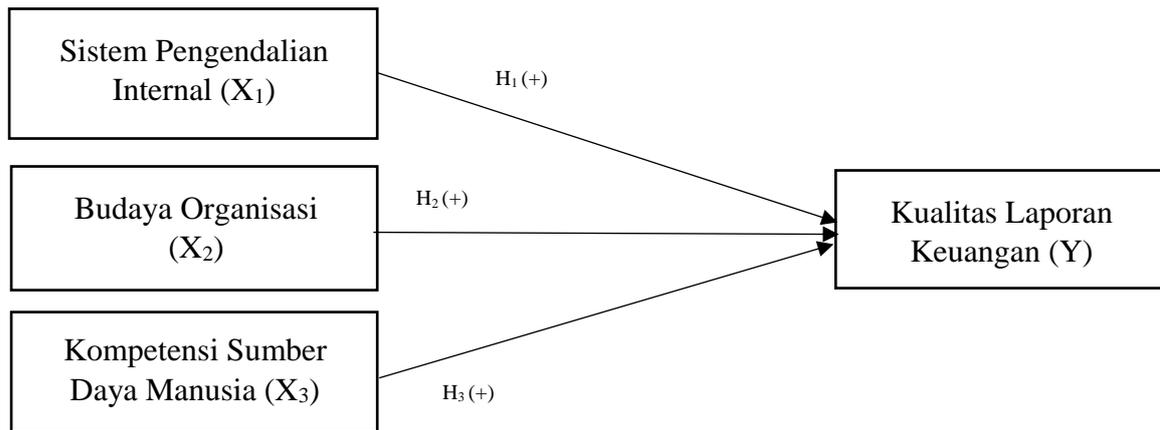
### 2.3.3 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dalam menjalankan fungsinya pemerintah sangat membutuhkan Sumber Daya Manusia. Dengan adanya Kompetensi Sumber Daya Manusia maka, laporan keuangan yang disusun memenuhi standar dan kualifikasi informasi. Terbatasnya jumlah pegawai pemerintah yang memiliki pendidikan akuntansi menyebabkan kurangnya pengetahuan dalam mengelola keuangan daerah dengan baik. Maka dalam menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya sangat diperlukan sumber daya manusia yang menguasai standar akuntansi pemerintahan. Tanpa adanya sumber daya manusia yang kompeten, kualitas laporan yang dihasilkan pun menjadi kurang baik.

Teori stewardship memiliki hubungan yang erat dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia yaitu hubungan antara kesuksesan organisasi dengan sumber daya manusia yang dimiliki. Semakin berkompotennya sumber daya manusia yang dimiliki maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin baik. Penelitian sebelumnya oleh (Apriansyah, 2020), (Mahardini, 2018), dan (Ariyanto, 2020) Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dari penelitian tersebut maka hipotesis yang disusun yaitu:

H<sub>3</sub> : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan

### 2.4. Model Penelitian



## 3. Metode Penelitian

### 3.1 Populasi

Populasi merupakan suatu wilayah terdiri dari objek atau subjek yang memiliki ciri tertentu untuk dikaji dan ditarik kesimpulan. Tujuan dari populasi yaitu agar mendapatkan data yang sesuai. Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di wilayah Kabupaten Semarang.

### 3.2 Sampel dan Teknik Sampling

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan Teknik *Purposive Sampling*, yang artinya sampel diambil dari populasi dengan kriteria tertentu. Tujuan dari penggunaan metode *Purposive Sampling* yaitu, untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Kriteria sampel yang digunakan yaitu pegawai satuan kerja pemerintah daerah yang memiliki wewenang, fungsi dan tugas dalam menyusun laporan keuangan. Penelitian ini mengambil sampel 3 pegawai yang bekerja di SKPD Kabupaten Semarang. 3 responden tersebut yaitu kepala bagian keuangan, bendahara, dan staff keuangan.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data dan Sumber Data**

Data dikumpulkan melalui kuesioner yang telah dibuat sebelumnya, kuesioner berisi daftar pertanyaan yang kemudian dibagikan kepada responden agar dapat diisi. Pertanyaan dibuat berdasarkan indikator variabel yang diukur. Kuesioner dibagikan secara langsung kepada responden, dengan demikian sumber data merupakan data primer. Skala yang digunakan yaitu skala likert. Dengan skala likert, variabel yang digunakan akan dijabarkan dan menjadi indikator dalam menyusun pertanyaan kuesioner.

### **3.4 Variabel Penelitian**

#### **3.4.1 Kualitas Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan catatan tersrtuktur yang memberikan informasi tentang kondisi keuangan suatu entitas dalam suatu periode tertentu. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dimensi yang digunakan sebagai pengukur variabel ini adalah Relevan, Andal, Dapat Dibandingkan dan Dapat Dipahami. Dari empat dimensi tersebut maka indikator yang digunakan yaitu :

1. Kesesuaian dan Ketepatan
2. Kebenar dan Keaslian
3. Perbandingan
4. Kejelasan

#### **3.4.2 Sistem Pengendalian Internal**

Sistem pengendalian internal adalah serangkaian kebijakan, prosedur, praktik, dan struktur organisasi yang dirancang untuk memastikan efisiensi, efektivitas, kepatuhan, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Indikator yang dapat digunakan untuk variabel ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan Pengendalian Intern

#### **3.4.3 Budaya Organisasi**

Budaya organisasi merupakan suatu pemahaman yang berkaitan dengan perilaku seseorang pada suatu organisasi dalam melakukan kegiatan. Budaya membentuk pandangan umum tentang bagaimana hal – hal dilakukan, cara komunikasi, dan hubungan antar individu dan kelompok yang dikembangkan di dalam organisasi. Menurut PERMENPANRB No. 39 Tahun 2012 budaya organisasi mencakup beberapa indikator yaitu :

1. Perilaku
2. Sikap
3. Etos Kerja
4. Komitmen
5. Inovatif
6. Pola Pikir

### **3.4.4 Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia dalam suatu organisasi menjadi elemen yang sangat penting, maka perlu adanya pengelolaan yang baik. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang kompeten dapat menjadi penentu suatu instansi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Menurut PERMENPANRB No. 37 tahun 2020 kompetensi sumber daya manusia diukur dengan beberapa indikator yaitu :

1. Pengetahuan
2. Keahlian
3. Profesionalitas
4. Sikap kerja

### **3.5 Alat analisis**

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif yang memiliki tujuan untuk menganalisis data dengan cara diskripsi atau menggambarkan data yang terkumpul sehingga dapat ditarik kesimpulan. Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menggambarkan data menjadi informasi yang jelas dan dapat dipahami. Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai hubungan antar variabel. Data yang diperoleh dan terkumpul akan diolah menggunakan alat analisis SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 26.

#### **3.5.1 Uji Kualitas Data**

##### **3.5.1.1 Uji Validitas**

Uji validitas merupakan pengujian untuk mengetahui seberapa besar ketelitian dan ketepatan suatu kuesioner dalam menerapkan fungsinya. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2021).

##### **3.5.1.2 Uji Reliabilitas**

Uji realibilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang menjadi indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2021).

#### **3.5.2 Uji Asumsi Klasik**

##### **3.5.2.1 Uji Normalitas**

Menurut (Ghozali, 2021) uji normalitas bertujuan untuk memverifikasi terdapat variabel pengganggu atau tidak dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual tersebut memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik dimana data terdistribusi dengan normal. Dalam penelitian ini digunakan uji Kolmogorov – Smirnov (K-S) sebagai uji normalitas.

##### **3.5.2.2 Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas adalah uji bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen), model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independent (Ghozali, 2021). Cara yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolinearitas yaitu dengan melihat nilai  $R^2$  yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, menganalisis matrik kolerasi variabel – variabel independen, dan dilihat dari nilai tolerance dan lawannya variance inflation factor (VIF).

### 3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Ghozali, 2021) uji heteroskedastisitas adalah uji yang bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas digunakan uji Scatterplot, yang dimana ditentukan berdasarkan deteksi ada atau tidaknya titik – titik yang membentuk pola (bergelombang, menyebar, atau menyempit) sehingga dari grafik tersebut dapat disimpulkan.

### 3.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah :

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

- Y : Kualitas Laporan Keuangan
- $\alpha$  : Konstanta
- b : Koefisien Regresi
- X<sub>1</sub> : Sistem Pengendalian Internal
- X<sub>2</sub> : Budaya Organisasi
- X<sub>3</sub> : Kompetensi Sumber Daya Manusia
- $\varepsilon$  : Error

### 3.5.4 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model variabel independent terhadap dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu. Jika nilai mendekati 1, artinya variabel independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Tetapi jika nilai R<sup>2</sup> semakin kecil, maka kemampuan variabel independent dalam menjelaskan variabel dependen cukup terbatas (Ghozali, 2021).

### 3.5.5 Uji – F

Uji yang digunakan untuk menguji tingkat signifikan koefisien regresi variabel independen secara simultan dengan variabel dependen. Kriteria yang dimiliki uji F yaitu jika probabilitas > 0,05 maka H<sub>1</sub> ditolak dan < 0,05 maka H<sub>1</sub> diterima (Ghozali, 2021).

### 3.5.6 Uji – t

Uji yang digunakan untuk menguji hubungan masing – masing variabel antara variabel independen dengan variabel dependen, untuk menguji hubungan tersebut maka digunakan uji regresi linier berganda. Jika nilai pada tabel signifikan <  $\alpha$  (0,05) maka H<sub>1</sub> diterima atau variabel independen terdapat hubungan signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2021).